

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

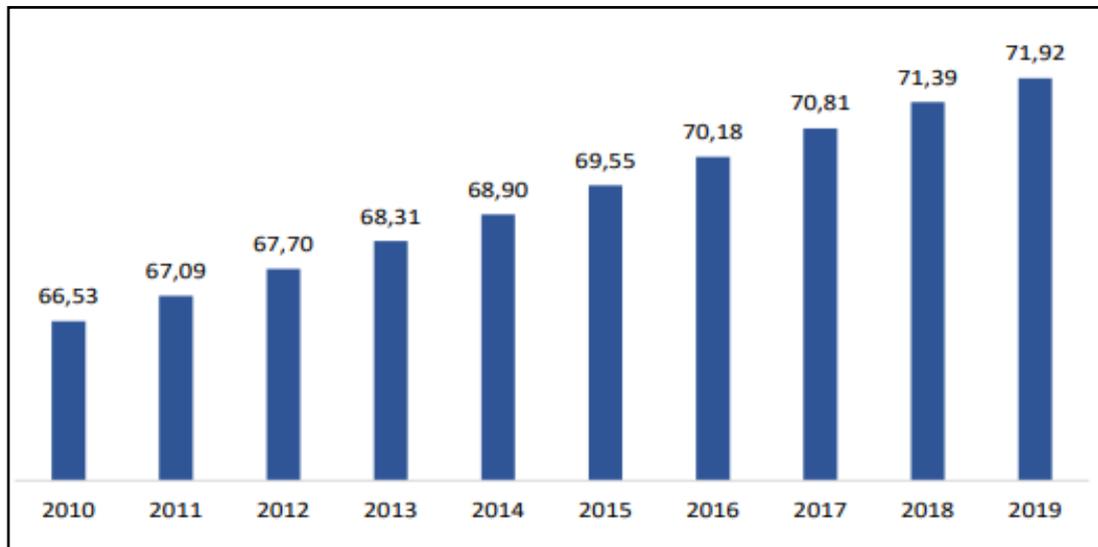
Kesejahteraan masyarakat ialah salah satu tujuan adanya pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kebanyakan masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat golongan menengah kebawah. Adanya hal tersebut maka menjadi dasar bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka perlu adanya tindakan-tindakan yang pemerintah harus lakukan. Kesejahteraan masyarakat yang kurang mendapat perhatian sering terjadi di Indonesia karena aspek ekonomi dan sosial lebih rentan terjadi di negara berkembang. Pembangunan nasional, tentunya dengan penerapan yang sistematis, rasional, efektif dan efisien sesuai dengan UUD 1945 merupakan salah bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat ialah sebuah kondisi dimana material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga masyarakat dapat menjalani hidup secara layak serta dapat mengembangkan diri mereka yang kemudian dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Pembangunan sosial ialah salah satu wujud dari pembangunan berskala nasional. Tujuan dari pembangunan sosial ialah kualitas dan kesejahteraan manusia mengalami peningkatan yang dimana hal ini didasarkan pada keadilan, kedamaian, serta terbentuknya sebuah lingkungan yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut memiliki kaitan erat dengan kebutuhan akan fisik, rohani, dan sosial.

Kesejahteraan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan sosial, dimana pelaksanaan pembangunan sosial ini dapat dilaksanakan secara perseorangan atau berkelompok. Upaya untuk melaksanakan pembangunan sosial ini ditujukan untuk kepentingan terpenuhinya taraf kesejahteraan sosial yang dimana masih perlu terus dikembangkan, hal ini disebabkan masyarakat Indonesia yang belum sampai ke taraf kesejahteraan sosial seperti yang telah direncanakan ini masihlah sangat banyak. Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah beserta segenap elemen yang terkandung di Indonesia tengah mengupayakan bagaimana kesejahteraan sosial ini terpenuhi, hal ini berarti secara langsung kesejahteraan sosial telah menjadi isu nasional.

Kesejahteraan masyarakat selalu berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang terdapat di sebuah daerah karena ketika masyarakat menderita kemiskinan dapat dikatakan kualitas hidup manusia atau masyarakatnya juga akan mengikuti. Indikator yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap kualitas hidup manusia ialah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana tujuannya ialah mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Adapun IPM Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2019 dapat dilihat melalui gambar 1.1.

Gambar 1. 1
IPM Indonesia Tahun 2010-2019



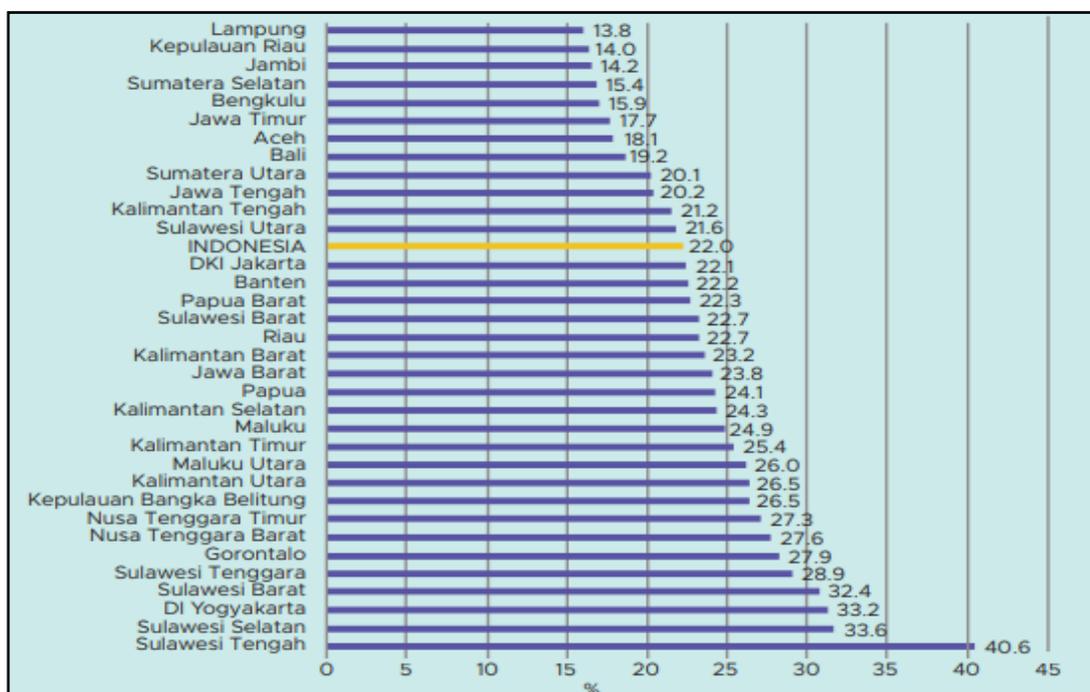
Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 maka bisa terlihat bahwa indeks pembangunan manusia terus meningkat di tiap tahunnya, dimulai dari periode 2010 hingga tahun 2019. Menurut BPS sendiri kategori IPM yaitu (1) $IPM < 60$: IPM rendah, (2) $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang, (3) $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi, (4) $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi. Adanya beberapa kategori yang ditetapkan oleh BPS maka Indonesia sendiri mengalami peningkatan kategori IPM karena nilai IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan kategori tersebut yaitu dari kategori IPM sedang yaitu berawal dari tahun 2010-2015 menjadi kategori tinggi dimulai tahun 2016-2019. Berdasarkan peningkatannya nilai IPM maka dapat dikatakan semua masyarakat kualitas hidup dan kesejahteraannya juga meningkat termasuk kesejahteraan penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan

kehidupan yang layak, seringkali hak-hak mereka terdiskriminasi dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang lain.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dimana jumlah penyandang disabilitas cukup banyak khususnya di beberapa provinsi yang harus mendapat perhatian. Setiap tahun peningkatan jumlah masyarakat penyandang disabilitas terus meningkat dengan banyaknya kelahiran bayi disabilitas di berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 proporsi penyandang disabilitas dewasa (18-59 tahun) secara keseluruhan Indonesia memiliki proporsi 22%. Adapun data proporsi penyandang disabilitas dewasa (18-59 tahun) berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2018 dapat dicermati pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2
Proporsi Penyandang Disabilitas Dewasa (18-59 Tahun) Menurut Provinsi



Sumber : Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.2 data proporsi penyandang disabilitas dewasa (18-59 tahun) menurut provinsi maka dapat diketahui bahwa proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, provinsi dengan proporsi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah 40,6%, kedua yaitu provinsi Sulawesi Selatan 33,6%, dan ketiga provinsi DI Yogyakarta 33,2%, provinsi dengan proporsi terendah di urutan pertama yaitu di Provinsi Lampung 13,8%, kedua yaitu provinsi Kepulauan Riau 14,0% dan ketiga provinsi Jambi 14,2%, sedangkan untuk Jawa Tengah masuk 10 besar provinsi dengan proporsi penyandang disabilitas terendah sebesar 20,2 %. Dengan adanya data tersebut maka untuk provinsi Jawa Tengah sendiri secara tidak langsung proporsi penyandang disabilitas usia dewasa tergolong proporsi rendah, tetapi dengan jumlah proporsi yang rendah tentunya masyarakat penyandang disabilitas memiliki peluang yang lebih besar dalam hal tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Hal ini karena jumlah masyarakat penyandang disabilitas sedikit, sedangkan pengambilan keputusan biasanya mendahulukan masyarakat mayoritas dengan jumlah yang banyak.

Terlepas dari proporsi penyandang disabilitas dan berkaitan dengan IPM sendiri yang sebelumnya juga telah dijelaskan. Perlu dicermati bahwa terdapat komponen yang perlu diperhatikan dalam IPM yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Umur panjang dan sehat diketahui melalui angka harapan hidup. Pengetahuan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kehidupan yang layak dapat diketahui melalui pengeluaran perkapita. Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa kota yang cukup strategis. Adapun kota tersebut yaitu Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan dan Kota

Tegal. Berkaitan dengan hal itu tentunya perlu diketahui nilai IPM Kota yang ada di Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. Hal ini dapat dipahami melalui tabel 1.1.

Tabel 1. 1
IPM Kota di Jawa Tengah

No	Kota	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Tengah		66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73
1.	Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23	81.19	82.01	82.72	83.19
2.	Salatiga	78.35	78.76	79.10	79.37	79.98	80.96	81.14	81.68	82.41	83.12
3.	Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34	80.14	80.76	80.85	81.46	81.86
4.	Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79	76.39	77.16	77.84	78.31	78.80
5.	Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.20	72.96	73.55	73.95	74.44	74.93
6.	Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69	73.32	73.77	74.24	74.77

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) 2020

Sesuai dengan Tabel 1.1 dapat diketahui secara keseluruhan bahwa IPM Provinsi Jawa Tengah dan Kota yang ada di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan nilai dan nilai IPM Kota seJawa Tengah semua berada diatas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah. Adapun berdasarkan Tabel 1.1 kota dengan IPM tertinggi dari tahun 2016-2019 yaitu Kota Semarang sedangkan kota dengan IPM terendah dari tahun 2010-2019 yaitu Kota Pekalongan. Menurut BPS sendiri terdapat beberapa kategori, yaitu (1) $IPM < 60$: IPM rendah, (2) $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang, (3) $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi, (4) $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi. Berdasarkan kategori IPM maka IPM Kota Semarang dari tahun 2010-2014 berada pada kategori IPM tinggi, sedangkan dari tahun 2015-2019 IPM Kota Semarang pada kategori sangat tinggi. Adanya kenaikan nilai IPM Kota Semarang setiap tahun menunjukkan kualitas hidup manusia pasti juga meningkat. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan masyarakat disabilitas. Akan tetapi hal tersebut ternyata belum sesuai dengan nilai

IPM Kota Semarang yang setiap tahunnya meningkat karena masyarakat disabilitas sendiri sebenarnya masih banyak yang masuk kedalam kategori masyarakat miskin dan tentunya belum sejahtera.

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan kemiskinan tentunya hal ini sangat kompleks dan perlu ketelitian ketika berbicara dua hal tersebut. Adapun presentase penduduk miskin kota-kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Presentase Penduduk Miskin Kota di Jawa Tengah

No	Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
Provinsi Jawa Tengah		11,32%	10,80%	11,41%
1.	Semarang	4,14%	3,98%	4,34%
2.	Salatiga	4,84%	4,76%	4,94%
3.	Pekalongan	6,75%	6,60%	7,17%
4.	Magelang	7,87%	7,46%	7,58%
5.	Tegal	7,81%	7,47%	7,80%
6.	Surakarta	9,08%	8,70%	9,03%

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) 2021

Sesuai dengan Tabel 1.2 dapat diketahui presentase penduduk miskin tertinggi secara keseluruhan yaitu Kota Surakarta sedangkan presentase terkecil yaitu Kota Semarang. Adapun secara keseluruhan juga dapat diketahui bahwa dari tahun 2018-2019 presentase kemiskinan disetiap daerah mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan kembali. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian daerah. Selain itu secara keseluruhan presentase penduduk kota-kota yang ada di Jawa Tengah dibawah presentase penduduk miskin provinsi Jawa Tengah. Presentase penduduk Kota Semarang yang terbilang kecil ternyata juga tidak didukung dengan presentase kemiskinan pada masyarakat disabilitas.

Berkaitan dengan kenaikan angka IPM setiap tahun dan presentase kemiskinan Kota Semarang yang terbilang kecil ternyata tidak didukung dengan kesejahteraan masyarakat disabilitas. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Masyarakat disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan seperti masyarakat lain pada umumnya. Kesejahteraan sosial sendiri diselenggarakan untuk sejumlah masyarakat yang tergolong ke dalam kriteria yang menjadi permasalahan di sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat disabilitas merupakan kriteria masyarakat yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan kesejahteraan. Diselenggarakannya kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk mencapai kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan para penyandang disabilitas, memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas dapat memenuhi fungsi sosial mereka, mendorong kesejahteraan sosial yang lebih bermatabat lagi bagi para penyandang disabilitas, serta menciptakan masyarakat yang inklusi, dimana tujuan tersebut tercantum di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Setiap tahun jumlah masyarakat penyandang disabilitas tentunya semakin banyak, hal ini kemudian mendasari Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan seluruh hak yang dimiliki para penyandang disabilitas melalui peran Dinas Sosial Kota Semarang. Adapun di Kota Semarang jumlah masyarakat penyandang disabilitas tahun 2019 cukup banyak yaitu 5.800 warga

(<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel> Diakses 1 April 2020 Pukul 07.51 WIB). Jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang miskin tahun 2017 yaitu 3.811 warga. Adapun jumlah masyarakat miskin penyandang disabilitas Kota Semarang tahun 2017 berdasarkan jenis kecacatan dapat dilihat melalui tabel 1.2.

Tabel 1. 3
Jumlah Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Kota Semarang Tahun 2017

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Netra/Buta	1126
2.	Tuna Rungu/Tuli	257
3.	Tuna Wicara/Bisu	331
4.	Tuna Rungu dan Wicara	161
5.	Tuna Daksa/Cacat Anggota Gerak	539
6.	Lumpuh Tuna Grahita/Cacat Mental	758
7.	Cacat Lainnya	639
Total		3.811

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2017

Informasi yang didapat melalui Tabel 1.2 adalah masyarakat miskin penyandang disabilitas tuna netra atau buta memiliki jumlah 1126, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah paling banyak diantara jenis penyandang disabilitas yang lain, kedua yaitu masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis lumpuh tuna grahita atau cacat mental dengan jumlah 758, diposisi ketiga yaitu masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis cacat lainnya dengan jumlah 639. Kemudian di posisi keempat yaitu masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis tuna daksa/cacat anggota gerak dengan jumlah 539, disusul dengan yaitu masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis tuna wicara/bisu dengan jumlah 331,

masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis tuna rungu/tuli dengan jumlah 257, masyarakat miskin penyandang disabilitas jenis tuna rungu dan wicara dengan jumlah 161.

Tahun 2020 total jumlah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masyarakat penyandang disabilitas yaitu 3.243 warga. Adapun jumlah 3.243 warga tersebut dibagi menjadi beberapa kecamatan di Kota Semarang, data tersebut terlampir di dalam tabel 1.3.

Tabel 1. 4
Jumlah DTKS Disabilitas Perkecamatan Kota Semarang 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Mijen	181
2.	Gunung Pati	205
3.	Banyumanik	203
4.	Gajah Mungkur	91
5.	Semarang Selatan	162
6.	Candisari	240
7.	Tembalang	233
8.	Pedurungan	263
9.	Genuk	302
10.	Gayamsari	129
11.	Semarang Timur	147
12.	Semarang Utara	281
13.	Semarang Tengah	160
14.	Semarang Barat	370
15.	Tugu	94
16.	Ngaliyan	182
Total		3.243

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2020

Sesuai dengan data yang terlampir di dalam Tabel 1.3, tergambar dengan jelas bahwa jumlah DTKS penyandang disabilitas yang paling banyak pertama yaitu kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 370, kedua kecamatan Genuk dengan jumlah 302, ketiga yaitu kecamatan Semarang Utara dengan jumlah 281, sedangkan jumlah DTKS penyandang disabilitas yang paling sedikit yaitu kecamatan Gajah Mungkur dengan jumlah 91 orang, kedua kecamatan Tugu dengan jumlah 94 orang, dan ketiga kecamatan Gayamsari dengan jumlah 129. Jumlah DTKS penyandang disabilitas sendiri sering kali digunakan untuk pemberian bantuan sosial oleh pemerintah melalui peran dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Masyarakat sering kali meremehkan penyandang disabilitas. Hal ini karena mereka dianggap dalam melakukan hal apa saja pasti tidak maksimal dengan kekurangan yang dimiliki setiap penyandang disabilitas. Kekurangan yang mereka miliki sering kali dianggap dengan istilah kecacatan, namun hal tersebut tidak membatasi mereka dalam memperjuangkan haknya dan memperoleh kehidupan yang layak termasuk juga kesejahteraan sosial. Jumlah antara masyarakat pada umumnya dengan masyarakat penyandang disabilitas tentu jika diperhatikan masyarakat disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang minoritas. Hal ini menjadikan keputusan atau perhatian pemerintah terhadap masyarakat disabilitas, dalam hal ini yaitu kesejahteraan sosialnya menjadi kurang mendapatkan perhatian. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas memaparkan bahwa dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat khususnya pada kesejahteraan kaum

disabilitas harus meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial juga termuat dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang terkait bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang.

Setiap masyarakat penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dalam memperoleh kehidupan yang layak, termasuk kesejahteraan, namun kenyataannya Dinas Sosial Kota Semarang belum secara penuh memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Hal ini dibuktikan masih adanya permasalahan terkait akses disabilitas pada tempat ibadah masih terabaikan, hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas banyak yang beribadah khususnya yang beragama muslim sering kali sholat jumat di teras masjid atau parkir (<https://www.ayosemarang.com/read/2020/02/12/52099/begini-keluhan-penyandang-disabilitas-di-musrenbang-jateng>. Diakses 1 April 2020 Pukul 08.50 WIB).

Berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas sendiri, sebenarnya masyarakat disabilitas salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Adanya hal itu maka Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial berupaya melakukan penanganan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, kemudian PMKS sendiri juga termuat dalam visi dari Dinas Sosial Kota Semarang. Berbagai permasalahan kesejahteraan masyarakat disabilitas secara singkat berdasarkan data yang telah dijelaskan yaitu :

- 1) Aksesibilitas tempat beribadah yang masih kurang memadai sehingga berakibat kepada masyarakat disabilitas yang beragam muslim pada saat ibadah Sholat Jum'at sering kali sholat di teras masjid dan tempat parkir. Hal ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial terkait kesamaan hak penyandang disabilitas dalam hal memperoleh aksesibilitas belum diperhatikan secara maksimal.
- 2) Presentase jumlah penyandang disabilitas miskin yang cukup banyak karena jumlah masyarakat disabilitas tahun 2019 yaitu 5.800 warga sedangkan jumlah masyarakat disabilitas tahun 2017 yang miskin yaitu 3.811 warga atau sekitar 65,7% dari total jumlah masyarakat disabilitas Kota Semarang tahun 2019.
- 3) Presentase jumlah DTKS disabilitas Kota Semarang tahun 2020 cukup tinggi yaitu 55,91% dengan jumlah 3.243 warga, sedangkan jumlah total masyarakat disabilitas Kota Semarang berdasarkan data tahun 2019 yaitu 5.800 warga.
- 4) Terdapat kesenjangan antara angka IPM Kota Semarang dari tahun 2010-2019 yang selalu mengalami peningkatan dan presentase kemiskinan Kota Semarang dari tahun 2018-2020 yang tergolong kecil dengan kesejahteraan masyarakat disabilitas dimana presentase masyarakat disabilitas miskin tahun 2017 sebesar 65,7% dan presentase jumlah DTKS disabilitas tahun 2020 sebesar 55,91%.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sendiri terkait beberapa permasalahan yang terjadi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang menjelaskan bahwa beberapa tugas

dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Semarang berkaitan dengan disabilitas yang mana salah satu bidangnya yaitu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan rehabilitasi dalam bentuk pembinaan atau pelatihan untuk penyandang disabilitas guna meningkatkan kesejahteraan. Adanya permasalahan kesejahteraan masyarakat disabilitas yang sebelumnya telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas”**.

1.2. Perumusan Masalah

Terkait permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, maka permasalahan tersebut dirumuskan menjadi :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan diselenggarakan penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam mendorong tingkat kesejahteraan bagi kaum disabilitas.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan secara dua hal, yang dimana diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi kajian terhadap ilmu administrasi publik, khususnya yang mengarah pada konsentrasi manajemen publik tentang peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas.
2. Secara praktis, penelitian ini memperoleh hasil yang dimana hasil tersebut dapat digunakan untuk bahan tinjauan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait khususnya kepada khususnya di Dinas Sosial Kota Semarang sebagai dasar untuk pelaksanaan kinerja pegawai.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ini menjadi pembanding antara fakta di lapangan dengan teori yang mendukung penelitian. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan bagi penelitian ini :

Tabel 1. 5
Matriks Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas	Baturangka, Theresia, dkk. 2019.	Deskriptif kualitatif.	Mengetahui peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.	Dinas Sosial Kota Manado dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat disabilitas yang diamna peranan tersebut terdiri atas peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik akan tetapi belum maksimal. Kurang optimalnya peran Dinas Sosial Kota Manado dalam hal ini ditunjukan melalui ketidakmerataan pelatihan beserta bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum terberdayakan secara baik.	Persamaannya yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan sama-sama menerapkan teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero sebagai indikator peran.	Perbedaanya yaitu teletak pada lokus penelitian dimana penelitian yang penulis lakukan di Dinas Sosial Kota Semarang sedangkan lokus penelitian terdahulu yaitu di Dinas Sosial Kota Manado. Perbedaan kedua terletak pada indikator peran representatif yang tidak diikutsertakan dalam penelitian terdahulu sedangkan penelitian penulis semua indikator dari Jim Ife dan Frank Tesoriero diikutsertakan. Adapun indikator tersebut yaitu peran fasilitatif, represenatif, edukasional dan teknis.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014	Ardiansyah, Darman. 2015.	Deskriptif kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="663 284 972 746">1. Mendapatkan informasi terkait Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Mendorong Tingkat Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau <li data-bbox="663 754 972 1249">2. Memperoleh informasi terkait program yang di buat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Mendorong Tingkat Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau 	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan perannya yaitu dalam tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang tergolong dalam kategori masyarakat disabilitas dengan mengimplementasikan program rehabilitasi yang telah ditetapkan. Program rehibilitasi tersebut telah terimplementasi sesuai dengan yang direncanakan.	Persamaannya yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan persamaan dalam melakukan pengkajian terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat disabilitas.	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan teori peran dari Soekanto untuk menganalisis peran dinas sosial sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2015 (Studi Kasus Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo)	Sosiawati, Arini. 2017.	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Pemenuhan Hak Anak Asuh di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015. 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Pemenuhan Hak Anak Asuh di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015. 	Peran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY sudah cukup baik. Peran yang dilakukan Dinas Sosial DIY dalam memenuhi Hak Anak Asuh di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015 meliputi pelaksanaan fungsi pengaturan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, selanjutnya fungsi pemberdayaan yaitu pemberian stimulant berupa bimbingan-bimbingan kepada anak asuh dan fungsi pelayanan. Faktor pendukung peran Peran yang dilakukan Dinas Sosial DIY dalam memenuhi Hak Anak Asuh di Asrama SLB Negeri 1 Kulon Progo tahun 2015 yang dimana anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar akan hal-hal yang baru, sedangkan faktor penghambatnya yaitu penyerapan ilmu yang lambat dan keberagaman jenis disabilitas yang disandang anak asuh.	Persamaannya yaitu menerapkan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dalam menganalisis peran berfokus pada fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan yang berpedoman pada Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran fasilitatif, represenatif, edukasional dan teknis yang berpedoman dari teori Jim Iff dan Frank Tesoriero sebagai indikator peran.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng	Adnyani, Ni Nyoman Puspa dan I Nyoman Surata. 2019.	Deskriptif Kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi terkait peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam melindungi dan memenuhi seluruh hak yang dimiliki penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng 2. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng. 	<p>Dalam menjalankan perannya untuk melindungi dan memenuhi hak yang dimiliki para penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memberikan sejumlah rumusan dan melakukan pengkoordinasian untuk mengimplementasikan program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan menjalin kerjasama terhadap satuan kerja perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat. Memberikan jaminan atas perlindungan serta memenuhi seluruh hak yang dimiliki penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng telah terimplementasi secara baik, dimana dilakukannya perencanaan terlebih dahulu di dalamnya yang kemudian program tersebut diimplementasikan sebagaimana mestinya. Program yang diterapkan dalam membina para penyandang disabilitas dan trauma diantaranya dengan memberikan pendidikan dan juga pelatihan serta pembimbingan kepada penyandang disabilitas dan eks trauma.</p>	<p>Persamaannya yaitu membahas tentang peran dari Dinas Sosial berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan disabilitas karena antara kesejahteraan masyarakat disabilitas dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih satu topik tentang disabilitas.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada pedoman yang digunakan untuk menganalisis, penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 karena penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian hukum empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero untuk menganalisis peran dinas sosial.</p>

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan	Arianti, Tri Puji. 2018.	Deskriptif Kualitatif	Mengetahui sejauhmana peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas.	<p>Peran Dinas Sosial mencakup aksesibilitas masih sulit dalam mengakses pelayanan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat umumnya dan juga untuk memperoleh fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas yang dimana fasilitas tersebut masih terbatas jumlahnya.</p> <p>Dinas Sosial memiliki peranan yang terdiri atas kesamaan kesempatan yang dimana terdapat keterbatasan di dalam jumlah, anggaran, serta kelengkapan data. Dalam melaksanakan peranan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ditemukan bahwa rehabilitasi yang dilakukan belum sesuai dengan standar dalam menjamin kesehatan penyandang disabilitas serta pemberian alat bantu berjalan juga masih ditemukan pembagiannya tidak merata.</p> <p>Dinas Sosial dalam menjalankan peranannya untuk memberikan sejumlah bantuan mengalami kendala dalam masalah ketebatasan anggaran, yang mengakibatkan dana yang diberikan akan disesuaikan terhadap anggaran yang tersedia.</p>	Persamaannya yaitu metode yang digunakan deskriptif dan kualitatif dan persamaan dalam mengkaji tentang peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas.	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan menggunakan Pembangunan Manusia yang dikemukakan oleh Alexander yang terdiri dari Arah Pengembangan Konsep Pembangunan Manusia serta Pemberdayaan Masyarakat. Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan yang meliputi aksesibilitas, kesamaan kesempatan, rehabilitasi dan bantuan sosial. Adapun untuk penelitian penulis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam menganalisis peran dinas sosial. Indikator dari teori Jim Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran fasilitatif, represenatif, edukasional dan teknis.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan	Lestari, Eta, dkk. 2017.	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan 2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang 3. Mengetahui implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang 	Upaya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan memberikn sejumlah fasilitas pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah yaitu Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Umumnya hambatan yang kerap kali ditemukan ialah upaya dalam memenuhi hak yang dimiliki para penyandang disabilitas ialah tidak tersedianya Balai Rehabilitas milik pemerintah, anggaran yang dimiliki tidak tercukupi, tenaga profesional yang masih terbatas jumlahnya, minimnya kesadaran orang tua akan kebutuhan anak disabilitas, infrastruktur yang dimiliki oleh sejumlah sekolah yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas masih belum terpenuhi. Undang-undang tentang CPRD seharusnya terimplementasikan melalui Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa untuk memenuhi seluruh hak yang dikhususkan kepada para penyandang disabilitas untuk mengakses sektor pendidikan.	Persamaanya yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang No 19 tahun 2011 tentang CPRD dan UU Nomor 8 Tahun 2016 untuk melihat dan menganalisis fenomena penelitian hak-hak penyandang disabilitas bidang pendidikan. Adapun penelitian penulis menggunakan indikator Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam menganalisis peran dinas sosial. Indikator dari teori Jim Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran fasilitatif, represenatif, edukasional dan teknis.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>Social Welfare for Disabled Communities</i>	Tjahjanti, Prantasi Harmi, dkk. 2018.	Deskriptif Kualitatif	Mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas penyandang disabilitas.	Peningkatan kesejahteraan sosial bagi komunitas penyandang cacat harus dimulai dari lingkungan kecacatan sejak masa kecil, yaitu keluarga dan peran pemerintah harus lebih optimal dalam hal aksesibilitas pelayanan.	Persamaanya yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.	Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tindakan yang dilakukan untuk mensejahterahkan disabilitas melalui komunitas dengan memperhatikan setiap rinci jenis disabilitasnya. Setiap disabilitas memiliki penanganan yang berbeda-beda dan harus didukung oleh peran orang tua dan pemerintah. Pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada kekeluargaan. Adapun penelitian penulis membahas peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>Social Welfare Policies for People with Disabilities in Vietnam and South Korea</i>	Kham, Tran Van dan Heung Seek Cho. 2016.	Deskriptif Komparatif	Membandingkan kebijakan Vietnam dan Korea Selatan dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas.	Vietnam kebijakannya lebih fokus pada kehidupan penyandang disabilitas, Korea Selatan kebijakannya yang lebih spesifik dan lebih jelas cakupannya serta pemberlakuan kebijakan/undang-undang jauh lebih awal dari negara Vietnam. Data-data yang digunakan untuk membuat kebijakan Korea Selatan jauh lebih detail dan terbuka sedangkan negara Vietnam masih kurang detail dan terbuka.	Persamaannya yaitu topik yang dibahas terkait kesejahteraan masyarakat disabilitas.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>Empowerment Of Persons With Disabilities Through Institutional Based Rehabilitation Services</i>	Kumar, Dev Nandan. 2017.	Deskriptif Kuantitatif	Mengetahui dan menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas melalui layanan rehabilitasi berbasis kelembagaan.	Pusat Regional Komposit menyediakan hanya 84% dari layanan rehabilitasi yang terkait dengan kesehatan untuk orang dengan kecacatan. Layanan rehabilitasi terkait dengan pendidikan dibatasi hingga 28%, layanan ketenagakerjaan adalah 20% dan layanan intervensi dini dibatasi hingga 12%.	Persamaannya yaitu penelitian terdahulu dan penelitian penulis masih dalam satu topik tentang penelitian penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan kedua yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pada bidang rehabilitasi sosial sedangkan penelitian penulis berfokus pada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberian pelatihan yang termasuk pada bidang pemberdayaan sosial.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>In Safe Hands: Empowering Young People With Disabilities Who Receive Assistance With Intimate Personal Care</i>	Muldon, Patricia dan Gloria Kirwan. 2015.	Deskriptif Kualitatif	Menganalisis potensi pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas muda yang menerima bantuan dengan perawatan pribadi intim.	Pemberdayaan anak muda penyandang cacat dapat menjadi kegiatan berskala besar di mana kehidupan banyak orang dapat diubah, tetapi juga bisa sangat beresiko pada tingkat mikro dari individu. Pekerja sosial berdasarkan posisi mereka dalam jaringan layanan disabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah pelayanan dan mengarahkan masyarakat disabilitas muda yang menerima bantuan sehingga memiliki perubahan dan potensi yang besar bagi kehidupan mereka.	Persamaanya yaitu metode penelitian yang digunakan digunakan deskriptif kualitatif.	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis, penelitian terdahulu menggunakan teori Muldoon tentang pemberdayaan masyarakat yang merupakan hasil penelitian dari salah satu penulis artikel. Adapun penelitian penulis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero tentang teori indikator peran.

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<i>Rehabilitation Based Society Model As The Fulfillment Of Childs's Need Effort With Disability</i>	Novianti, Ranti dan Husen Ali Akbar. 2017.	Deskriptif Kualitatif	Merumuskan model pemberdayaan berbasis rehabilitasi sebagai lembaga upaya pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas di wilayah desa.	Proses implementasi, studi dan pengembangan ini membentuk sebuah siklus. Pertama melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui produk yang dibutuhkan dalam pemberdayaan berbasis rehabilitasi. Setelah itu, produk dikembangkan dalam situasi tertentu, divalidasi, direvisi, diuji, direvisi lagi hingga ditemukan produk akhir yang sempurna.	Persamaanya yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.	Perbedaannya yaitu terletak pada konsep yang digunakan untuk menganalisis, peneliti terdahulu menggunakan konsep Research and Development (R&D) sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero tentang teori indikator peran. Penelitian terdahulu juga hanya berbasis pada rehabilitasi sedangkan penelitian penulis meliputi bidang rehabilitasi, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan. Lingkup penelitian terdahulu yaitu disabilitas di wilayah desa sedangkan penelitian penulis di wilayah kota.

Sumber : Diolah Pada Tahun 2020

Sesuai dengan yang terlampir di dalam Tabel 1. 4 diketahui bahwa setiap Dinas Sosial yang ada di Indonesia melaksanakan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel 1. 4 yaitu peran Dinas Sosial khususnya yang berfokus pada masyarakat disabilitas dilaksanakan melalui beberapa bidang. Sebagian besar program yang dibahas pada Tabel 1. 4 yaitu bidang rehabilitasi, jaminan sosial, melindungi dan memenuhi hak yang dimiliki masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat disabilitas sesuai dengan Undang-Undang serta pemberian pelatihan. Adapun perlindungan dan pemenuhan atas hak yang dimiliki masyarakat disabilitas yang diberikan salah satu bentuknya dibidang pendidikan. Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas sendiri meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif dan peran teknis.

Upaya Dinas Sosial dalam melaksanakan perannya juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama yang dilakukan terdiri dari pihak swasta, lembaga pemerintahan, dan komunitas yang ada disetiap daerah. Pelibatan keluarga ataupun orang tua penyandang disabilitas juga merupakan hal penting, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas yang usianya masih anak-anak. Permasalahan yang muncul sebagian besar yaitu masih minimnya aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama, akses dalam merehabilitasi para masyarakat disabilitas belum mencukupi dimana hal ini belum dapat menjamin kesehatan masyarakat yang merupakan kaum disabilitas, ketidakmerataan bantuan sosial yang diberikan, serta masyarakat disabilitas yang diberdayakan masih kurang jumlahnya.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sebagian besar yaitu mengkaji terkait peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas atau melakukan pemberdayaan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode yang diterapkan, yaitu menerapkan deskriptif kualitatif. Perbedaan terdapat di dalam bidang yang menjadi fokus penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan yang diberikan, hak yang terpenuhi, dan sebagian berfokus pada rehabilitasi sosial sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan rehabilitasi sosial. Perbedaan yang lain terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena penelitian. Adapun teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori tentang indikator peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yang meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif dan peran teknis.

1.5.2. Teori Administrasi Publik

1.5.2.1. Definisi Administrasi Publik

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Inu Kencana Syafii (2010 : 23-24) mengutarakan penilaiannya tentang administrasi publik, administrasi publik memiliki beberapa definisi, yaitu :

- 1) Administrasi publik diidentifikasi dengan pelaksanaan pendekatan pemerintah dan baru-baru ini didikte oleh badan delegasi politik.
- 2) Administrasi publik ialah upaya yang dilakukan oleh sejumlah individu atau kelompok untuk saling berkoordinasi guna menjalankan pendekatan pemerintah;

3) Secara keseluruhan administrasi publik ialah sebuah siklus yang diidentifikasi dengan dilaksanakannya pendekatan pemerintah yang jumlahnya tidak terbatas, dan pangarahan kemampuan yang dapat memberikan panduan dan alasan usaha kepada beberapa kelompok.

Administrasi publik didefinisikan menjadi beberapa pengertian oleh Felix A.Nigro & Lloyd G. Nigro dalam Inu Kencana Syafiie (2010 : 24), yaitu :

- 1) Administrasi publik merupakan upaya-upaya yang terjalin antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya dan masih dalam lingkup pemerintahan.
- 2) Administrasi publik meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta relasi diantara ketiga lembaga.
- 3) Administrasi publik merupakan pondasi didalam perumusan suatu kebijakan karena hal tersebut merupakan bagian proses yang tidak dapat dilewatkan dari politik.
- 4) Adminitrasi publik memiliki relasi yang begitu dekat dengan pihak-pihak swasta ataupun perorangan utamanya dalam memberikan pelayanan.
- 5) Adminstrasi publik ternyata memiliki perbedaan makna dengan adminstrasi perorangan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Inu Kencana Syafiie (2010 : 24) administrasi publik ialah administrasi yang terdapat di suatu negara yang dimana negara termasuk ke dalam organisasi, dan administrasi diselenggarakan dengan berfokus terhadap tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan. Administrasi publik ialah bidang ilmu yang berfokus pada melaksanakan politik negara, pendapat tersebut dijelaskan oleh Arifin Abdulrachman dalam Inu Kencana

Syafiie (2010 : 25). Administrasi publik salah satu bidang ilmu yang memperelajari organisasi supaya dapat digerakan, diarahkan, juga didukung dengan sumber daya yang serta organisasi tersebut juga harus dipimpin, makna adminstrasi publik tersebut merupakan argumentasi dari Edward H. Litchfiel dalam Inu Kencana Syafiie (2010 : 25)

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock & Louis W. Koenig dalam Inu Kencana Syafiie (2010 : 25) administrasi publik adalah aktivitas pemerintah pada saat melakukan kekuasaan politiknya. Administrasi publik diibaratkan seperti sebagian dari siklus organisasi atau individu yang memiliki relasi dekat dengan implemetasi hukum dan prosedur yang sebelumnya telah diberlakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tesebut merupakan kesimpulan yang diungkapkan oleh George J. Gordon dalam Inu Kencana Syafiie (2010:25).

1.5.2.2.Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran paradigma administrasi negara sesuai dengan argumentasi Henry (1995 : 21-49) dalam Keban (2014 : 31-33) terjadi sebanyak 5 kali, tetapi baru-baru ini terdapat satu paradigma yang nantinya akan dibahas, yaitu:

1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Dalam paradigma ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White berperan sebagai tokoh dibalik paradigma ini, dimana Goodnow memaparkan bahwa politik diharuskan untuk menaruh perhatiannya terhadap kebijakan, sedangkan pada bidang administrasi diharuskan untuk memperhatikan pengimplementasian kebijakan tersebut. Di dalam politik dan administrasi

harus terdapat pemisahan yang dimana pemisahan tersebut termanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang mengemban tugas untuk menyuarakan keinginan rakyat dan badan eksekutif akan mengeimplementasikan kehendak yang tersuarakan tersebut, sedangkan peran badan yudikatif di dalam hal ini ialah bersama-sama dengan badan legislatif mencanangkan tujuan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk setiap kehendak rakyat yang berhasil tersuarakan. Implikasi paradigma tersebut terletak pada administrasi berfungsi sebagai suatu sistem yang bebas nilai dan dilaksanakan guna memenuhi nilai efisiensi dan ekonomi yang berasal dari *government bureaucracy*. Penekanan di dalam paradigma ini terletak pada aspek locus yaitu *government bureaucracy* namun fokus yang dipaparkan di dalam paradigma ini dijelaskan dengan kurang terperinci.

2. Paradigma prinsip-prinsip (1927-1937)

Willoughby, Gullick dan Urwick merupakan tokoh dibalik terbentuknya paradigma ini, dimana tokoh-tokoh tersebut mendapatkan pengaruh oleh sejumlah tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Willoughby, Gullick dan Urwick mempublikasikan prinsip dari administrasi yang berfokus pada administrasi publik. Sejumlah prinsip tersebut dicantumkan di dalam PODSCROB dengan disertai argumentasi yang menyatakan bahwa prinsip tersebut bersifat universal. Para paradigma ini, fokus lebih ditekankan dibandingkan dengan lokusnya yang bahkan sama sekali tidak dibahas.

3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Morstein Marx berpendapat bahwa politik dan administrasi sulit untuk dipisahkan atau dibedakan, lain halnya dengan Herbert Simon yang berpendapat terdapat ketidaksesuaian prinsip administrasi yang universal sebab administrasi negara juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ilmu politik dalam paradigma ketiga cenderung mendominasi sehingga mengakibatkan ilmu administrasi publik hampir kehilangan jati dirinya.

4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Paradigma keempat mengutarakan prinsip manajemen pernah terkenal lebih diperdalam ilmunya secara ilmiah. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb adalah fokus paradigma keempat, sedangkan lokus dari paradigma keempat tidak jelas.

5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-1990)

Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik merupakan fokus administrasi publik, sedangkan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik merupakan lokusnya.

6. Good Governance (1990-Sekarang)

Good governance muncul pada tahun 1990-an yang dianggap penting sebagai paradigma baru. Secara sederhana banyak pihak yang mengartikan bahwa good governance tidak hanya melibatkan sektor pemerintahan saja tetapi juga terdapat dua aktor lain yaitu sektor swasta dan masyarakat. Oleh sebab itu Putra Teddy M (2019 : 35) menyatakan memahami good governance berarti

memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta, dan masyarakat dalam suatu aturan yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan paradigma administrasi yang dijelaskan maka penelitian ini termasuk paradigma keenam yaitu good governance. Hal ini karena Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perannya yaitu meningkatkan kesejahteraan disabilitas, masyarakat merupakan sasarannya dan pihak pemerintahnya yaitu Dinas Sosial Kota Semarang. Kerjasama juga terjalin antara Dinas Sosial Kota Semarang dan pihak swasta baik itu komunitas ataupun pihak swasta yang lainnya.

1.5.2.3. Manajemen Publik

Kebijakan publik selayaknya sistem kerja dari otot dan syaraf, sedangkan pada manajemen publik lebih mirip dengan sistem dari kerja jantung dan sirkulasi tubuh, kedua sistem tersebut tentu berbeda seperti perbedaan antara kebijakan publik dengan manajemen publik. Proses dalam menggerakkan sejumlah sumber daya manusia dan non manusia dalam menjalankan “perintah” yang dibentuk oleh kebijakan publik didefinisikan sebagai manajemen publik, yang dimana hal ini dikemukakan oleh Ott, Hyde dan Shafritz (1991: 10) dalam Keban (2014: 93). Sebuah studi interdisipliner yang terdiri atas sejumlah aspek umum di dalam suatu organisasi dan termasuk ke dalam kelompok dari fungsi manajemen yang tersusun atas perencanaan, penorganisasian, dan pengawasan dan di sisi lain berupa sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik yang dimana ini merupakan definisi dari manajemen publik. Administrasi publik harus tanggap dan lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang diterapkan seperti pada dunia bisnis, pendapat tersebut diungkapkann oleh Wilson. Hal ini dikarenakan melalui manajemen

publik, administrasi publik berkeinginan untuk meninjau berapa besar manajemen publik dapat diandalkan untuk menerapkan suatu prinsip yang ditujukan untuk menciptakan kinerja pegawai yang optimal selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dapat dikatakan kepentingan umum. Pada dasawarsa 1990-an mulai berkembang model NPM menciptakan sejumlah inspirasi terbaru di dalam perkembangan manajemen publik di sejumlah negara. NPM merupakan salah satu pendekatan manajemen publik, namun beberapa ahli menyatakan bahwa NPM tidak cocok karena manajemen publik cenderung bersifat swasta.

1.5.3. Perilaku Organisasi

Perilaku Organisasi atau *Organizational Behavior* merupakan salah satu bidang studi yang perlu dipelajari oleh masyarakat. Stephen P. Robbins (2008 : 11) menyatakan perilaku organisasi merupakan bidang studi berperan di dalam penyelidikan terhadap pengaruh yang terkandung di dalam suatu individu, kelompok, bahkan struktur terhadap perilaku yang ditimbulkan di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengimplementasikan studi sejenis sehingga suatu organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Perilaku organisasi menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang individu, kelompok dan pengaruh dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja secara lebih efektif. Menurut Stephen P. Robbins (2008) ada beberapa hal yang menjadi fokus untuk dibahas dalam mempelajari bidang studi perilaku organisasi, hal-hal yang menjadi pembahasan dalam perilaku organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Dasar-dasar perilaku individual

Dasar-dasar perilaku individual menjelaskan perihal kemampuan dan seperangkat jenis kemampuan, karakteristik dalam biografis, langkah dalam menciptakan perilaku yang sesuai pada diri individu lainnya, dan juga mengelompokkan peran hukuman dan pembelajaran.

b. Sikap dan kepuasan kerja

Hal yang dibahas yaitu terkait komponen utama dari sikap, peran konsisten dalam sikap, hubungan antara sikap dan perilaku, penyebab kepuasan kerja, respon karyawan terhadap ketidakpuasan kerja.

c. Kepribadian dan nilai

Berkaitan dengan faktor penentu kepribadian, sifat-sifat kepribadian, sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi, jenis-jenis nilai, lima dimensi nilai kultur.

d. Persepsi dan pembuatan keputusan individual

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi persepsi, hubungan antara persepsi dengan pembuatan keputusan, proses pembuatan keputusan yang rasional, dan etika dalam pembuatan keputusan.

e. Motivasi

Berkaitan dengan teori motivasi pada zaman dahulu dan kontemporer serta cara atau langkah memotivasi karyawan. Teori motivasi yang terkenal diantaranya Teori X dan Y, Teori dua faktor, dan Teori kebutuhan.

f. Emosi dan suasana hati

Berkaitan dengan perbedaan antara emosi dan suasana hati, aspek emosi dan suasana hati, sumber emosi dan suasana hati, upaya dalam mengatasi emosi dan suasana hati yang buruk pada individu dalam organisasi.

g. Kerjasama Tim

Menegaskan bahwa kerjasama tim memiliki perbedaan dengan kelompok, kemudian juga menjelaskan berbagai jenis tim, cara menciptakan tim yang kreatif, serta mengubah individu menjadi pemain tim.

h. Dasar-dasar perilaku kelompok

Dasar-dasar perilaku kelompok menjelaskan tentang klasifikasi kelompok, tahap perkembangan kelompok, peran, norma, status, ukuran, dan kekohesifan kelompok, serta pengambilan keputusan dalam kelompok. Berkaitan dengan peran, peran kelompok dalam organisasi sendiri sangat penting karena setiap individu memainkan peran berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan guna mencapai visi dan misi setiap organisasi. Peran dalam hal ini juga tidak terlepas dari identitas peran, persepsi peran dan ekspektasi peran.

Berdasarkan hal yang menjadi pembahasan dari teori perilaku organisasi, salah satunya menjelaskan dasar-dasar perilaku kelompok yang mana didalamnya menyinggung tentang peran. Peran yang dibahas terkait dengan peran dalam suatu kelompok didalam suatu organisasi. Setiap individu memiliki perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini merupakan hal yang penting terkait peran suatu organisasi. Visi dan misi suatu organisasi dapat tercapai melalui peran organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

1.5.4. Peran

Menurut Robert Linton dalam Aco Musaddad (2018 : 28) dimana dia merupakan seorang antropolog yang mengembangkan teori peran menyatakan bahwa secara teori peran mengilustrasikan interaksi di dalam lingkup sosial yang dapat diistilahkan sebagai sejumlah aktor yang berperan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam budaya. Harapan peran ialah sebuah pemahaman bersama yang akan membawa kita dalam berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori ini, individu yang memiliki mempunyai peran tertentu diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya. Seorang individu ataupun kelompok ketika dia menjalankan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Edy Suhardono (2016 : 3) menyatakan bahwa sebuah fungsi yang diterapkan oleh seseorang saat individu tersebut menjabat suatu posisi dalam struktur sosial merupakan arti atau definisi dari peran itu sendiri. Menurut Soekanto (2010 : 212) sebuah perilaku yang sesuai dengan harapan orang lain dimana individu tersebut menjabat di suatu status yang kemudian disebut sebagai peran.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Aco Musaddad (2018 : 31) teori peran diklasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu :

- 1) Sejumlah orang yang berperan aktif dalam berinteraksi pada lingkungan sosialnya.
- 2) Perilaku yang timbul pada saat proses interaksi tersebut berlangsung.
- 3) Status orang tersebut dalam berperilaku.
- 4) Hubungan antara orang dan perilaku

Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008 : 558-613) terdapat beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu pada sebuah organisasi yang menjadikan tujuan proses pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan, indikator peran tersebut diantaranya :

a) Peran fasilitatif

Peran dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sekaligus juga peran dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada kelompok masyarakat tertentu.

b) Peran edukasional

Peran yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang berfokus pada pemberian masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat.

c) Peran representatif

Peran representatif merujuk pada interaksi dengan badan atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat guna kepentingan penyandang disabilitas seperti mendapatkan sumber bantuan modal usaha dari luar, melakukan pembelaan pada masyarakat disabilitas yang mendapat tindakan diskriminasi, dan memperkenalkan hasil produksi melalui media masa sehingga menarik perhatian pihak luar untuk mendukung program yang dilakukan.

d) Peran teknis

Peran teknis lebih condong pada kemampuan seseorang atau kelompok pada suatu organisasi dalam melaksanakan perannya seperti peran dalam pengumpulan data dan analisis, kemampuan penggunaan komputer, serta kemampuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

1.5.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran

Faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankan suatu peran baik itu peran yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi sekalipun pasti selalu ada. Faktor pendorong pada umumnya cenderung memudahkan pencapaian peran dari organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut, dan sebaliknya terdapat juga faktor penghambat yang menjadi kendala dalam menjalankan suatu peran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Menurut Horton dan Hunt dalam Chrecencya Ekarishanti dan Kismartini (2019) faktor pendorong peran antara lain :

1) Kompetensi

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan perannya membutuhkan kompetensi dari setiap individu yang menjadi anggota organisasi guna menjalankan suatu kegiatan dalam bentuk perilaku yang saling berkaitan.

2) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan serta berkaitan dengan adanya perubahan perilaku dalam masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi.

3) Perilaku peran

Perilaku peran berkaitan dengan perilaku yang diharapkan oleh dan dari seseorang dalam status tertentu sehingga secara tidak langsung perilaku peran yaitu perilaku seseorang/kelompok dalam organisasi yang sesuai dengan perannya.

Adapun faktor penghambat peran yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan peran yang sesuai dengan visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

1) *Role conflict*

Konflik yang berlangsung diantara peran satu terhadap peran lainnya dan konflik yang terjadi di dalam satu peranan merupakan peran konflik yang sering terjadi.

2) *Role transition*

Role transition disini memiliki arti adanya perubahan dari satu peran ke peran yang lain, tentunya harus diimbangi dengan kesiapan berupa pengalaman belajar dan adaptasi karena perubahan peran seringkali tidak sama dengan peran sebelumnya, adapun jika sama ada beberapa hal yang menjadi tambahan dan ada yang harus dihilangkan.

3) *Role distance*

Kesenjangan peran biasanya terjadi jika seseorang atau kelompok merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan perannya dan pada umumnya hal ini menimbulkan perasaan tertekan dan terbebani.

Peran suatu organisasi yang maksimal pada dasarnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat karena tanpa peran sekaligus tanggungjawab aktor-aktor yang ada di organisasi maka program dari organisasi tidak dapat terwujud sebagaimana tujuan yang telah direncanakan. Peran organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasarannya tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bentuk output yang positif dari pencapaian tujuan. Terlepas dari hal itu tentu dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendorong dan penghambat peran yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai saat peran dari organisasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

1.5.6. Kesejahteraan Masyarakat

Keadaan sejahtera meliputi yaitu kondisi fisik, psikis, dan juga sosial, tidak hanya sebatas upaya untuk memperbaiki ataupun memberantas keburukan di dalam lingkungan sosial, maka hal ini disebut sebagai sebuah kondisi dan aktivitas, pendapat ini dikemukakan oleh dalam Darman Ardiansyah (2015). UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 memaparkan bahwa kesejahteraan sosial ialah kondisi dimana seluruh kebutuhan akan material, spiritual, dan sosial yang dibutuhkan warga negara dapat terpenuhi secara baik sehingga masyarakat dapat menjalani hidupnya dengan jauh lebih layak serta dapat mengembangkan dirinya yang berguna untuk memenuhi fungsi sosial. Menurut Dolgoff, Feldstein, dan Stolnik dalam Bagus Aryo dan Rissalwan (2014 : 2) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah semua intervensi sosial yang

ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial manusia.

Andrew, dkk dalam Muhammad Burso (2018 : 115) mengungkapkan kesejahteraan hidup masyarakat selalu berhubungan dengan pendapatan dan faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan/tingkat penghasilan, dan pendidikan. Kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk memprioritaskan masyarakat yang dikategorikan sebagai bentuk dari masalah sosial, yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sendiri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Adapun dalam meningkatkan kesejahteraan sosial disetiap daerah tentunya dilakukan oleh Dinas Sosial, berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial Kota Semarang terdiri dari beberapa bidang, yaitu sebagai berikut :

a. Pemberdayaan sosial

Urusan pemberdayaan sosial meliputi pembinaan dan pengembangan, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial berkaitan dengan dana hibah dan bantuan sosial, dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial merupakan bagian dari bidang pemberdayaan sosial.

b. Rehabilitasi sosial

Bidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, dan perdagangan orang.

c. Perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga.

d. Penanganan fakir miskin

Bidang penanganan fakir miskin berkaitan dengan penanganan fakir miskin daerah rentan, penanganan fakir miskin perkotaan dan pengolahan data kemiskinan.

1.5.7. Disabilitas

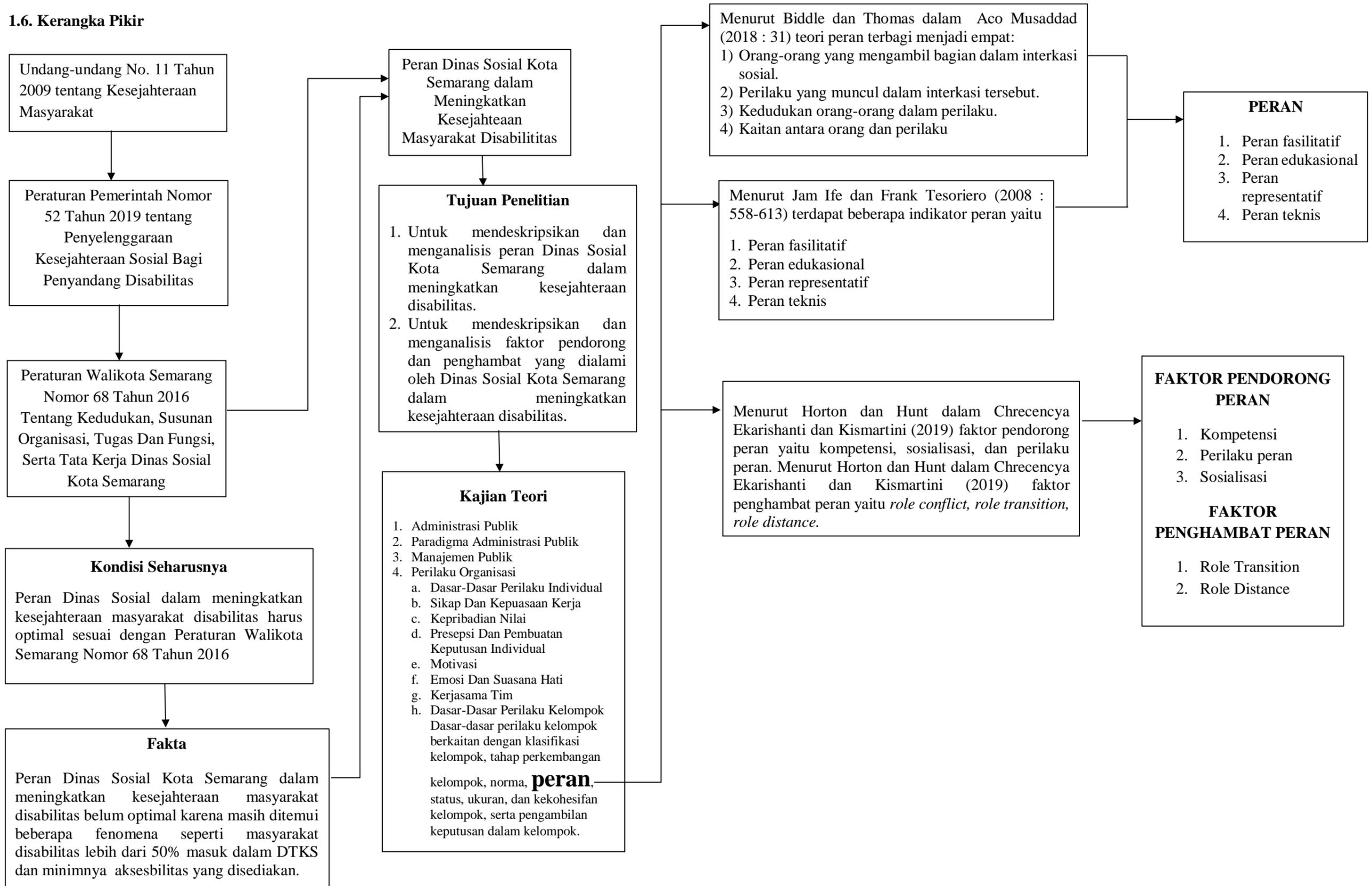
Penyandang cacat telah menyebabkan kekeliruan beberapa orang dalam memahami penyandang cacat, hal ini diutarakan oleh Ari Pratiwi, dkk (2018 : 6). Pengubahan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas kemudian menjadi salah satu cara dalam menghindari dan juga menekan angka pelanggaran HAM, sehingga Komnas HAM melakukan diskusi dengan sejumlah pakar pada tahun 2009. Menurut Akhmad Soleh (2016 : 22) berpendapat bahwa disabilitas atau cacat ialah Seseorang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, kepandaian, ataupun indera yang dimilikinya dalam jangka waktu yang panjang sehingga dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya mereka mengalami keterhambatan yang menyebabkan sulitnya berpartisipasi secara penuh dan aktif

sesuai dengan asas kesamaan hak di masyarakat sosial. Hamirul (2020 : 177) menyatakan penyandang disabilitas ialah sekumpulan individu yang dikategorikan sebagai individu yang terbatas secara fisik dan juga psikis dalam waktu yang lama bahkan tidak memiliki batas waktu, yang dimana keterbatasan itu menyebabkan mereka mengalami serangkaian kesulitan apabila berpartisipasi aktif dengan lingkungannya. Penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus sesuai dengan karakter, yaitu sebagai berikut :

- 1) Disabilitas dengan karakteristik fisik yang berbeda, diantaranya :
 - a. Tunadaksa, ialah individu yang fisiknya berbeda dengan individu lainnya, dimana terdapat kecacatan tubuh bawaan (sejak lahir) atau dapat diakibatkan karena kecelakaan.
 - b. Tunanetra, ialah individu yang penglihatannya terhambat dan dapat digolongkan ke dalam *total blind* dan *low vision*.
 - c. Tunarungu, ialah individu yang pendengarannya mengalami hambatan. Jenis disabilitas ini dapat bersifat permanen dan dapat juga sementara.
 - d. Tunawicara, ialah kecacatan dalam berbicara.
- 2) Disabilitas dengan karakteristik psikis yang berbeda, yaitu :
 - a. *Down Syndrom*/Tunagrahita, merupakan disabilitas yang memiliki *IQ* kurang dari 80.
 - b. Lambat belajar, merupakan disabilitas yang memiliki *IQ* antara 80-90an.
 - c. Autis, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan pada perkembangan dan konsentrasi.

- d. *Hiperaktif*, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan pada perkembangan yang umumnya terlalu aktif dalam bertingkah laku.
- e. *Gifted*, merupakan disabilitas berbakat yang memiliki kelebihan pada suatu atau beberapa bidang.
- f. Jenius, merupakan disabilitas yang memiliki *IQ* diatas 140.
- g. Tunalaras, ialah individu yang sulit bersosialisasi dengan lingkungannya karena tidak sesuai dengan norma yang diterapkan di lingkungannya.

1.6. Kerangka Pikir



1.7. Argumen Penelitian

Peran Dinas Sosial Kota Semarang merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas sehingga mereka yang kurang diperhatikan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat lain dapat melakukan fungsi sosialnya sebagaimana masyarakat pada umumnya, namun peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas ternyata belum maksimal karena masih ada kendala atau masalah-masalah yang ditemukan. Peran yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas juga didukung adanya faktor pendorong peran dan faktor penghambat peran. Faktor pendorong peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas yaitu kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran sedangkan faktor penghambatnya yaitu *role transition* dan *role distance*.

1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Peran

Peran dalam penelitian ini adalah perilaku individu-individu dalam organisasi dimana individu-individu tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dapat diukur melalui :

1) Peran fasilitatif

- a. Pemberian dorongan atau motivasi kepada masyarakat disabilitas.
- b. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat disabilitas.
- c. Pemberian rehabilitasi sosial bagi masyarakat disabilitas.

2) Peran edukasional

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat disabilitas.

- b. Pemberian informasi terkait potensi yang memiliki peluang.
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat disabilitas.
 - d. Melakukan pelatihan terhadap masyarakat disabilitas.
- 3) Peran representatif
- a. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan potensi.
 - b. Melakukan promosi sebagai kelanjutan pemberian pelatihan.
 - c. Membuka jaringan kerja dengan pihak lain bagi masyarakat disabilitas.
 - d. Melakukan tindakan perlindungan bagi disabilitas yang terdiskriminasi.
 - e. Membantu masyarakat disabilitas untuk mendapatkan modal usaha dari donatur.
- 4) Peran teknik
- a. Kemampuan pegawai dalam menginput dan menganalisis data.
 - b. Kreatifitas pegawai menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat disabilitas.

1.8.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran

Faktor pendorong dalam penelitian ini adalah hal-hal yang mendukung peran yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi, sedangkan faktor penghambat peran dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang mengurangi kemungkinan-kemungkinan tercapainya peran yang dijalankan oleh individu di dalam organisasi.

Adapun faktor pendorong peran dapat diukur melalui :

- 1) Kompetensi
 - a. Pengetahuan pegawai.

- b. Pengalaman bekerja pegawai.
 - c. Pendidikan pegawai.
- 2) Sosialisasi
- a. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pegawai.
 - b. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi oleh pegawai.
- 3) Perilaku peran
- a. Kesesuaian pendidikan dan kedudukan pegawai dalam organisasinya.
 - b. Sikap tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan kewajibannya.

Indikator faktor penghambat peran sendiri dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

- 1) Role transition
- a. Perubahan jabatan yang dilakukan oleh dinas.
 - b. Kemampuan pegawai dalam beradaptasi pada jabatan yang baru.
- 2) Role distance
- a. Kesenjangan peran antar pegawai.
 - b. Beban kerja yang diberikan kepada pegawai.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Penelitian memiliki dua metode yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas” menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013 : 6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk

mengerti secara mendetail bagaimana fenomena tersebut terjadi pada subjek penelitian, contohnya pada perilaku, pemikiran, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya yang dimana dilaksanakan secara holistik dan dengan cara deskriptif yang dimana cara ini digambarkan dengan susunan kata dan bahasa, di dalam sebuah konteks khusus yang bersifat alamiah serta dengan menggunakan serangkaian metode alamiah. Secara umum jenis penelitian terdapat tiga macam diantaranya yaitu sebagai berikut :

1) Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu yang ada dilapangan yang kemudian juga dicatat, dianalisa, dan diimplementasikan sesuai dengan situasi yang ada dilapangan.

2) Penelitian eksploratif

Penelitian eksploratif identik dengan hipotesis yang belum jelas sehingga sifatnya lebih terbuka tetapi masalah yang dirumus akan lebih detail jika menggunakan penelitian eksploratif.

3) Penelitian eksplanatori

Penelitian eksplanatori digunakan untuk mengecek relasi antara variabel yang satu dengan yang lain dan menilai hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti.

Desain penelitian ini yaitu metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif karena berusaha mengungkapkan dan menganalisis permasalahan yang ada dilapangan dengan menjelaskan sebab akibat masalah tersebut terjadi untuk memperoleh informasi mengenai peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Penelitian kualitatif tipe deskriptif akan

menghasilkan data deskriptif dimana data ini digambarkan melalui susunan kata atau secara lisan berdasarkan pengamatan akan subjek ataupun tingkah laku subjek penelitian.

1.9.2. Situs Penelitian

Tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan oleh peneliti yang dinamakan situs penelitian. Dinas Sosial Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang merupakan situs dalam penelitian ini. Dinas Sosial Kota Semarang dipilih sebagai tempat/wilayah penelitian karena merupakan organisasi publik yang memiliki kedudukan, peran dan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas, namun berdasarkan data dan beberapa artikel perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemui beberapa permasalahan.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sejumlah individu yang menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian yaitu subjek penelitian. Sumber informasi nantinya didapatkan melalui subjek penelitian terkait situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menerapkan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011 : 85) *purposive sampling* ialah teknik yang dapat diaplikasikan apabila hendak menentukan sampel dengan menerapkan sejumlah kriteria tertentu. Kriteria yang dipertimbangkan contohnya pada seseorang yang dirasa dapat memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan

untuk kepentingan penelitian atau dapat dikatakan sebagai teknik dalam menghimpun sampel penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penentuan subjek dalam penelitian ini tentunya mempertimbangkan tugas, fungsi dan tanggungjawab informan pada status dan kedudukannya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat disabilitas. Adapun subjek penelitian atau informan berdasarkan metode *purposive sampling* dalam penelitian yang berjudul Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas yaitu :

1. Staff Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang.
2. Pendamping Disabilitas Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang.
3. Kordinator PKH Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang.
4. Pendamping PKH Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Masyarakat disabilitas (3 orang).

1.9.4. Jenis Data

Data merupakan suatu bahan yang menerangkan sebuah objek penelitian yang dimana data ini dapat dihimpun selama proses penelitian berlangsung. Data merupakan bahan mentah yang belum diolah sehingga belum bisa dikatakan sebagai informasi. Data dikategorikan ke dalam dua jenis :

- 1) Data kuantitatif

Data kuantitatif sendiri memiliki makna data yang berkaitan dengan angka-angka ataupun bilangan yang dapat diukur.

2) Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dengan angka ataupun ukuran lainnya dimana bentuknya dapat berupa atribut, wawancara atau pendapat dari pihak yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menerapkan jenis data kualitatif artinya data yang diterapkan/digunakan berupa sejumlah kalimat informatif, tulisan, ataupun pemaparan akan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri. Adapun data yang diperoleh berasal dari jawaban atas pertanyaan wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

1.9.5.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas terdiri dari :

1) Data primer

Sugiyono (2009 :137) menyatakan bahwa data primer ialah data yang didapatkan melalui sumber yang secara langsung didapatkan dengan melakukan penelitian terhadap subjek penelitian, hal ini berarti peneliti mendapatkan data ataupun sejumlah informasi secara langsung dengan menerapkan sejumlah instrumen yang telah ditetapkan di dalam penelitian ini yang kemudian data yang berhasil dihimpun ini peneliti olah. Data primer yang diterapkan oleh peneliti berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti di Dinas Sosial Kota Semarang dan hasil yang diperoleh dari aktivitas wawancara atau daftar jawaban yang peneliti

tanyakan kepada sejumlah informan yang berperan sebagai subjek penelitian yaitu Staff Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang, Pendamping Disabilitas Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang, Kordinator PKH Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang, Pendamping PKH Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang, dan masyarakat disabilitas sejumlah tiga orang.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009 : 137) jenis data ini didapatkan dari sumber tidak langsung. Biasanya jenis data ini didapatkan melalui pengkajian akan bukti, catatan atau laporan historis yang sudah disusun ke dalam suatu arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Umumnya bentuk data sekunder yang ditemukan lebih banyak yang dalam bentuk statistik atau data yang telah diolah sehingga data berjenis sekunder telah siap digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen, buku, artikel, dan pendukung lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas, regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian dan data statistik yang telah diolah oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk melangsungkan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya :

a) Observasi

Observasi atau pengamatan ialah teknik dalam menghimpun data melalui pengamatan langsung pada lapangan. Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016 : 145) mendeskripsikan observasi sebagai sebuah upaya yang kompleks dimana upaya ini terdiri atas sejumlah proses biologi dan psikologis, diantara kedua tersebut yang paling penting ialah dalam upaya untuk mengamati dan mengingat fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti mengobservasi Dinas Sosial Kota Semarang untuk memperoleh sejumlah informasi terkait aktivitas yang dilaksanakan untuk mendorong kesejahteraan pada kaum disabilitas.

b) Wawancara

Wawancara ialah sebuah aktivitas dalam memperoleh informasi secara langsung dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang berperan sebagai informan yang dimana jawaban atas pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai data yang dimanfaatkan di dalam penelitian ini. Dalam menghimpun data melalui wawancara, pertanyaan dan jawaban yang akan diperoleh mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2016 : 137-138). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Staff Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang, Pendamping Disabilitas Kementerian Sosial RI, Koordinator PKH Kementerian Sosial RI, dan Pendamping PKH Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra Dinas Sosial Kota Semarang untuk memperoleh data terkait dengan peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas, faktor pendorong dan faktor

penghambat yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat disabilitas untuk melengkapi data dan membandingkan antara informasi yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang dan Kementerian Sosial RI yang merupakan mitra dari Dinas Sosial Kota Semarang.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan keadaan pada saat observasi pengertian dari dokumentasi. Dokumentasi pada saat observasi di Dinas Sosial Kota Semarang merupakan bentuk dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

d) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang diterapkan di dalam penelitian ini dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang terkandung di dalam artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas serta regulasi yang berkaitan dengan kesejahteraan disabilitas.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Proses mengenali dan menata data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dimana data tersebut di kelompokkan dalam kategori, kemudian dijabarkan dan dipilih mana yang penting untuk dipelajari sehingga nantinya dapat ditarik benang merah sehingga mudah dipahami merupakan proses analisis data yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011 : 244). Analisis data kualitatif ialah proses dalam menganalisis data yang dimana sifatnya

ialah induktif yang berarti dalam penganalisisan data analisis yang diterapkan didasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh peneliti yang selanjutnya dikembangkan sehingga berbentuk hipotesis. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 246-253) mengatakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data ini tersusun atas :

1) Reduksi data

Reduksi data berkaitan dengan proses meresume, memilih dan memperhatikan point-point yang dianggap penting untuk penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data kasar yang diperoleh pada saat penelitian. Adanya proses tersebut bertujuan agar data terorganisasikan sehingga lebih mudah dipahami.

2) Penyajian data

Sekelompok informasi yang disusun dengan tujuan untuk membuka segala potensi kemungkinan dalam menari kesimpulan beserta memutuskan tindakan yang tepat yang dimana definisi tersebut merupakan definisi dari penyajian data. Penyajian data sendiri bisa berbentuk deskripsi singkat, bagan, dan hubungan antar teori.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah hasil/temuan baru yang ditemukan dan sebelumnya belum pernah ada, yang dimana temuan tersebut dapat dikatakan sebagai wujud dari uraian akan objek yang tengah diteliti dengan mendetail, sehingga objek tersebut menjadi jelas, baik dalam hubungan kasual, hipotesis ataupun teori.

1.9.8. Kualitas Data

Pasolong (2013 : 174) menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah penelitian dinyatakan valid apabila ditemukan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan data sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Untuk menguji keabsahan data maka dilangsungkan uji validitas dan reliabilitas. Sugiyono (2011 : 267) mengidentifikasi pada penelitian kualitatif, suatu validitas yang dimana digambarkan sebagai derajat untuk mengukur tingkat ketepatan suatu data yang berkaitan dengan objek penelitian dengan daya yang bisa dilaporkan oleh penelitian. Dalam suatu penelitian kualitatif, reliabilitas yang digunakan ialah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2011 : 268). Kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergatangan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) merupakan empat kriteria keabsahan data menurut Sugiyono (2011 : 269-277) :

1) *Credibility*

Bentuk dari ukuran akan kebenaran suatu yang data yang berhasil dikumpulkan, dimana akan mengilustrasikan bagaimana data tersebut cocok dengan konsep yang diterapkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian hal ini didefinisikan sebagai konsep kredibilitas. Pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan melengkapi data yang didapatkan dari sejumlah sumber.

2) *Transferability*

Keteralihan berkaitan dengan hasil penelitian guna memperoleh derajat keteralihan paling tinggi tergantung kemampuan yang dimiliki peneliti dalam mengembangkan makna secara esensial terhadap temuan di dalam

penelitiannya dan menganalisis secara kritis temuan tersebut di dalam pembahasan penelitian.

3) *Depenability*

Depenability diistilahkan juga sebagai reliabilitas. Suatu penelitian dapat dinyatakan reliabel apabila peneliti lain dapat merefleksikan proses penelitian tersebut ke dalam penelitiannya.

4) *Konfirmability*

Melaksanakan pengujian terhadap hasil yang ditemukan peneliti berkaitan dengan langkah yang dilaksanakannya, jika hasil tersebut berupa fungsi dari proses penelitian, maka penelitian dapat dinyatakan sesuai dengan standar *konfirmability*, hal ini berarti suatu penelitian hasilnya sesuai dengan proses penelitiannya.

Dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, dengan langkah (Moleong, 2012 : 331) :

- a. Melakukan perbandingan data yang didapatkan dari proses pengamatan dengan data yang diperoleh dari aktivitas wawancara;
- b. Membandingkan informasi yang didapatkan di depan umum dengan informasi yang diungkapkan sendiri;
- c. Membandingkan informasi orang-orang perihal keadaan pada saat melakukan penelitian dengan situasi yang dikemukakan informan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan kondisi dan pandangan seseorang dengan sejumlah argumen dan perspektif individu lain;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.